

BAB IV

UPAYA DAN HAMBATAN CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL DI MYANMAR

Dalam bab IV, penulis akan menjelaskan upaya-upaya Child Soldiers International dalam menanggulangi penggunaan tentara anak di Myanmar. Upaya dan hambatan Child Soldiers International berjalan sejak 2012 hingga 2013. Upaya pertama yang dijalankan ialah misi penelitian di Myanmar, Upaya Child Soldiers International dengan bekerjasama dengan pihak-pihak pemegang kunci yaitu PBB dan badan lain PBB. Dan upaya Child Soldiers International dengan publikasi laporan hasil dari penelitian menjadi sumber daya sosialisasi internasional.

A. Upaya Child Soldiers Internasional Secara Global

15 tahun Child Soldiers International telah berdiri sebagai koalisi dengan nama "Coalition to Stop the Use of Child Soldiers" dan kemudian menjadi organisasi yang berdiri bebas pada tahun 2011. Dalam upayanya untuk menanggulangi penggunaan tentara anak di dunia, Child Soldiers International menerbitkan empat laporan global. Tiga pertama selama hidup sebagai koalisi diterbitkan pada tahun 2002, 2004 dan 2008, dan yang berikutnya laporan analisa perkembangan negara-negara di semua aspek perekrutan tentara anak dan penggunaan, termasuk kebijakan dan praktik nasional, dan komitmen internasional. Berhubungan dengan tahun kesepuluh dari berlakunya instrumen utama internasional dalam menanggulangi penggunaan tentara anak "OPAC"

(Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict), Child Soldiers International membuat perbedaan dalam laporan global tahun 2012. sejak laporan global Child Soldiers International terakhir di tahun 2008, dalam pembuatan laporan Child Soldiers International menggunakan pendekatan ringkasan yang berisi tentang perkembangan signifikan. Child Soldiers Internasional memutuskan untuk meninjau undang-undang, kebijakan dan praktek lebih dari 100 negara untuk memahami lebih baik tentang bagaimana tujuan pencegahan dari OPAC oleh pembuat kebijakan internasional ke hambatan efektif untuk mencegah perekrutan anak dan penggunaan anak dalam permusuhan dan terbit dalam laporan yang dihasilkan **“Louder Than Words: an agenda for action to end state use of child soldiers”** pada bulan September 2012.⁵² Laporan tersebut kemudian menjadi subjek dari beberapa pertemuan untuk pengarahannya tindak lanjut di Jenewa, London dan Washington DC.

Dalam melakukan kegiatan advokasi nasional dan internasional, Child Soldiers International menanggung dengan memberikan tekanan pada negara pihak untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam OPAC. Secara khusus Child Soldiers International terlibat dengan dewan keamanan PBB di bawah pemantauan dan pelaporan mekanisme melalui resolusi 1612 pada perekrutan dan penggunaan tentara anak dalam rangka mendorong implementasi OPAC yang efektif.

⁵² Child Soldiers International, “Director’s report and Final Statements” (2013) diunduh dari <http://www.childrightscommission.org.uk/pada tanggal 20 Oktober 2014>

Mitra utama Child Soldiers International ialah LSM internasional dan nasional. Secara teratur, Child Soldiers International melakukan pertukaran berbagai informasi dengan LSM-LSM secara global, nasional dan lokal dan di negara-negara dimana Child Soldiers International memiliki program aktif. Pada 2011-2013 Child Soldiers International melakukan penelitian dan proyek advokasi bersama di Chad (informal), Democratic Republic of Congo (DRC), Myanmar dan Thailand. Secara umum Child Soldiers International bergabung dengan kelompok LSM yang berbasis di Jenewa untuk CRC, advokasi pengaduan mekanisme yang kuat dan komprehensif tentang konvensi hak-hak anak, memberikan kontribusi untuk advokasi dalam pelanggaran terhadap OPAC untuk dimasukkan dalam ketentuan hukuman.

CSI memiliki strategi advokasi internasional untuk mengakhiri penggunaan anak dibawah umur sebagai tentara. Menurut Alfred J. Kahn (1969):⁵³

“Proses perencanaan sosial merupakan upaya sengaja untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam program dan praktek.” Dan program menurut David Novick dalam Theory and Practice of Social Planning: “Program adalah kombinasi dari kegiatan untuk memenuhi tujuan akhir.”

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, upaya Child Soldiers International di Myanmar difokuskan dengan program penelitian untuk menemukan cara yang efektif tentang langkah-langkah yang diperlukan, kebijakan dan praktek untuk mengakhiri penggunaan anak-anak dalam pertempuran dengan angkatan bersenjata negara dengan kelompok-kelompok bersenjata. Kemudian kerjasama

internasional untuk mengembangkan kampanye advokasi yang didukung dengan dasar bukti yang berasal terhadap Myanmar.

B. Upaya Child Solidiers International Melalui Penelitian di Myanmar

Child Soldiers International melakukan misi penelitian berbasis penelitian meja pada Maret 2011 di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar bekerjasama dengan HREIB dan terus terlibat sebagai mitra NGO.⁵⁴ Kemudian berlanjut dalam tiga penelitian terpisah pada bulan April-Mei 2012, Juli-Agustus 2012, dan November-Desember 2012 di Thailand, di perbatasan Thailand-Myanmar dan di Myanmar.

Tujuan dari program penelitian tersebut adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai pola arus dan metode perekrutan anak-anak dan penggunaannya oleh tentara nasional, pasukan penjaga perbatasan (BGF) dan kelompok bersenjata non pemerintah. Serta untuk menilai efektivitas prosedur disiplin dan sanksi hukum bagi pihak yang bertanggungjawab merekrut dan menggunakan anak-anak dalam konflik aktif. Program tersebut juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang situasi anak yang terlibat dengan kelompok bersenjata non negara untuk berjuang menentang kekuatan negara. Pada bagian tersebut, Child Soldiers International memfokuskan program penelitian pada KNU/KNLA dan DKBA serta Program penelitian tersebut di lakukan Child Soldiers International untuk menuntunnya dalam mencari langkah untuk pihak-pihak terkait yang akan membangun penghalang yang efektif untuk penggunaan tentara anak di masa depan. Selain itu, informasi yang berhasil dikumpulkan

⁵⁴ Child Soldiers International, "Director's report and Final Statements 2012" diunduh dari <http://www.childsoldiersinternational.org.uk> pada tanggal 23 Oktober 2014

kemudian untuk digunakan dalam melakukan advokasi yang ditargetkan pada pihak kunci penindak isu-isu tentara anak.

Child Soldiers International selama masa penelitian, terus melakukan pertemuan dengan para pejabat PBB di Myanmar dan Thailand, para Pejabat International Committee of the Red Cross, para diplomat, perwakilan organisasi non-pemerintah nasional (LSM), mantan tentara anak-anak dan secara kekeluargaan. Child Soldiers International juga melakukan pertemuan dengan perwakilan dari KNLA, KNU, dan DKBA. Child Soldiers International juga terlibat diskusi dengan menteri Aung Min dan Staff dari Myanmar Support Initiative dan perwakilan dari empat partai politik dan organisasi masyarakat sipil di Yangoon dalam misi penelitiannya.⁵⁵

Child Soldiers International berusaha untuk memberikan kontribusi perlindungan anak dari perekrutan dan penggunaan anak dalam pertemuan dengan semua pihak di Myanmar berdasarkan temuan yang dihasilkan dari penelitian dan dari rekomendasi yang diberikan. Hasil penelitian dan rekomendasi tersebut dijabarkan dalam laporan *Chance for Change: Ending the Recruitment and Use of Child Soldiers in Myanmar*.

1. Identifikasi Kebijakan

Child Soldiers International mengidentifikasi kebijakan nasional dan internasional di Myanmar sebagai salah satu bentuk perubahan dari laporan Child Soldiers International ditahun-tahun sebelumnya sebagai upaya untuk

memahami pelanggaran yang terjadi. Identifikasi hukum oleh Child Soldiers Internasional menyatakan bahwa:⁵⁶

Dalam upaya melalui identifikasi hukum, Child Soldiers International menjelaskan bahwa Myanmar telah meratifikasi Convention on the Right of the Child pada tahun 1991 sehingga Myanmar melakukan sendiri perlindungan terhadap hak-hak anak termasuk melindungi anak-anak yang mengambil bagian langsung dalam permusuhan (dalam Convention on the Right of the Child pasal 38), namun Myanmar belum mengambil langkah selanjutnya yaitu meratifikasi Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (OPAC) tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (yang mulai berlaku pada tahun 2002) yang berisi serangkaian luas kewajiban negara dan ditunjukkan untuk mengakhiri perekrutan tidak sah dan penggunaan tentara anak.

Dalam identifikasi hukum Myanmar oleh Child Soldiers International bahwa Myanmar juga telah meratifikasi ILO Convention 29 tentang kerja paksa, namun tidak meratifikasi ILO Convention 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dan ILO Convention 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Myanmar juga tidak menjadi pihak dalam Roma Statute tentang mahkamah pidana internasional yang mengharuskan negara untuk mengkriminalisasi kejahatan perang, menetapkan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah 15 tahun atau mengizinkan mereka untuk berperang.

permusuhan. Myanmar juga merupakan pihak dalam Jenewa Convention 1949, tapi tidak untuk Additional Protocolnya.

Child Soldiers International menjelaskan bahwa meskipun Myanmar tidak banyak meratifikasi hukum internasional tentang penggunaan anak dibawah umur dalam permusuhan, tetapi Myanmar memiliki hukum nasional yang melarang perekrutan dibawah umur 18tahun ke dalam angkatan bersenjata, hukum nasional tersebut diatur dibawah ketentuan directive Myanmar Defence Services and War Office Council no. 13/73 tahun (1974) dari kantor dewan pelayanan pertahanan dan perang Myanmar. Perekrutan adalah tindakan sukerela dibawah hukum saat ini. The 1959 People's Militia Act, dan telah digantikan oleh State Peace and Development Council (SPDC) Law no. 27/2010 (the People's Military Service Law), menyediakan bahwa usia wajib militer adalah 18tahun atau lebih, dengan pemberitahuan khusus yang dikeluarkan oleh kepala negara. Namun undang-undang tersebut tidak pernah dilaksanakan dan hukum 2010 belum digunakan.

Bagian 374 dari KUHP Myanmar yang mengkriminalisasi kerja paksa, juga menyatakan bahwa "menarik setiap orang untuk kerja terhadap kehendak seseorang adalah tindakan pidana yang dapat mengakibatkan penjara sampai 12bulan, atau keduanya dan kejahatan perekrutan paksa terhadap anak-anak kedalam angkatan bersenjata berada di bawah ketentuan pidana tersebut." Urutan 1/99 dan ketertiban tambahan 1/99 juga menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi larangan menurut kerja paksa, termasuk pemerintah daerah, anggota angkatan bersenjata, anggota kepolisian dan tenaga pelayanan publik

Pada tahun 1993 Undang-Undang anak diberlakukan, dengan aturan prosedur yang diangkat pada tahun 2001. Undang-Undang tersebut mendefinisikan hukuman dan pelanggaran termasuk pelecehan dan pengancaman anak-anak, dan memperkerjakan anak-anak untuk bahaya melakukan pekerjaan tidak sehat atau berbahaya. Namun dibawah undang-undang anak tersebut, anak diklasifikasikan sebagai siapapun yang berusia dibawah 16 tahun. Mereka yang berusia 16-18 tahun dianggap pemuda. Child Soldiers International menyatakan bahwa kekhawatiran telah dirasakan oleh CRC tentang ketentuan tersebut, dan Hukum anak tahun 1993 sedang dikaji dengan bantuan teknis dari UNICEF dan ahli hukum internasional untuk membawanya sesuai dengan Convention On the Right of the Child dan norma-norma internasional lainnya.

2. Penelitian Child Soldiers International terhadap Tatmadaw Kyi, BGF (DKBA Forces¹²⁴) dan KNU/KNLA dan DKBA

Child Soldiers International menemukan fakta-fakta yang terjadi melalui misi penelitian yang dilakukannya. Child Soldiers International mengungkapkan bahwa meskipun terjadi kemajuan baru-baru ini karena adanya Join Action Plan yang berisi ketetapan rencana untuk mengidentifikasi dan pelepasan anak-anak di Tatmadaw Kyi dan pasukan penjaga perbatasan (BGF) yang telah ditandatangani oleh pemerintah Myanmar dan PBB pada 28 Juni 2012 yang membawa kemajuan dengan telah dibebaskannya 42 anak,⁵⁷ tidak membuat situasi membaik secepat mungkin. Perekrutan anak-anak oleh tatmadaw kyie masih berlangsung, meskipun

datang belum - diberlakukan. Child Soldiers International dalam mencari temuannya melalui misi penelitian difokuskan terhadap 3 kelompok: Tatmadaw Kyi, pasukan penjaga perbatasan/BGF (Democratic Karen Buddhist Army (DKBA forces¹²⁴) dan terhadap kelompok bersenjata non negara (KNU/KNLA dan DKBA (Democratic Karen Benevolent Army)).

a. Penelitian Child Soldiers International terhadap Tatmadaw Kyi

Temuan Child Soldiers International dalam misi penelitian terhadap Tatmadaw Kyi bahwa:

- 1) Perwira militer masih terus melakukan perekrutan dengan menggunakan cara intimidasi, paksaan, kekerasan fisik dan kasus broker sipil yaitu anak-anak direkrut dengan cara dijual.
- 2) Proses panjang untuk melacak seorang anak yang hilang. Untuk mencari anak yang hilang dan untuk melaporkannya, dibutuhkan dokumen verifikasi usia seperti akta kelahiran atau kartu identitas sekolah, surat dengan rincian tentang kapan dan dalam keadaan apa anak tersebut hilang. Kemudian informasi tersebut harus disampaikan pada Departemen Administrasi Umum (GAD) dan kantor pemerintah daerah di bawah departemen dalam negeri, untuk mendapatkan surat keterangan bahwa anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Pada saat menerima surat dari GAD, baru kemudian anak dapat dilaporkan hilang di kantor polisi setempat. Namun untuk mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan memakan waktu yang lama dan

- dalam beberapa kasus melakukan penundaan untuk membebaskan anak tersebut, meskipun dokumen yang dibutuhkan telah terpenuhi.
- 3) Kurangnya sistem pemantauan nasional sistematis dan independen di Myanmar yang telah digabungkan dengan langkah-langkah terbatas sejauh ini telah gagal untuk mencegah perekrutan dibawah umur meskipun tindakan tersebut melawan hukum.
 - 4) Anak-anak yang berusaha melarikan diri dari tatmadaw Kyi mengalami penangkapan dan hukuman penjara. Anak-anak tersebut dipenjara bersama-sama dengan orang dewasa, sering kali mereka mengalami pelecehan seksual dan penyiksaan oleh sesama tahanan.
 - 5) Pemerintah telah gagal untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dari hukuman penjara yang telah tercermin dalam komitmen yang terkandung dalam Join Action Plan dengan PBB tahun 2012 yang berisi Pemerintah Myanmar telah menerima bahwa anak-anak harus dibebaskan dari penjara, bahwa mereka yang berusia dibawah 18 tahun tidak akan ditangkap atau dituntut. Anak-anak yang berusaha melarikan diri dari tentara, mereka terus ditangkap, ILO telah mendapatkan laporan tersebut pada tahun 2012 dari total 77 kasus yang diterima antara tahun 2007 hingga 2012.

b. Penelitian Child Soldiers International terhadap BGF (Democratic Karen Buddhist Army (DKBA Forces124))

Pada tahun 2010 Mayoritas DKBA forces124 bertransformasi menjadi pasukan penjaga perbatasan (BGF) secara resmi ditandai dengan empat upacara

yang diadakan di berbagai lokasi. " Child Soldiers International (2010) " [http://www.childsoldiers.org](#)

komando selatan-timur. DKBA telah terdaftar sebagai pihak yang terlibat konflik yang merekrut dan menggunakan anak-anak dalam pertempuran yang tercatat dalam laporan tahunan pada anak-anak dan konflik bersenjata dari sekretaris jenderal PBB pada tahun 2007, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Dalam laporan sekretaris jenderal PBB 2012, BGF terdaftar sebagai salah satu pihak dalam konflik yang merekrut dan menggunakan anak-anak, bersama dengan tatmadaw Kyi.

Child Soldiers International menerima pengakuan dari beberapa sumber saat misi penelitian terhadap DKBA forces¹²⁴ dan menemukan bahwa:

- 1) Batalyon BGF tidak diberi senjata langsung oleh pemerintah, namun mereka diberi dana untuk membeli senjata mereka sendiri.
- 2) Komandan BGF menjauhkan anak-anak dari program pelatihan bersama dengan tatmadaw kyi untuk menyembunyikan fakta perekrutan anak-anak tersebut karena tatmadaw kyi telah berpesan untuk menghentikan perekrutan terhadap anak-anak dibawah umur. Hal tersebut karena BGF terus berada dibawah tekanan untuk meningkatkan jumlah pasukan mereka yang telah habis karena adanya pembelotan pasukan.
- 3) Kuota perekrutan telah diberlakukan oleh komandan BGF di desa-desa yang berada dibawah kendali mereka. Sebelum bertransformasi menjadi BGF, DKBA forces¹²⁴ telah mengoprasikan sistem undian. Bahwa dalam beberapa kasus, sebuah keluarga mengirim anak mereka berusia dibawah 18tahun untuk direkrut sebagai pengganti anggota keluarga yang lebih tua yang ditahan

Pada tahun 2010, program perekrutan skala besar dimulai oleh BGF. Hal ini terjadi karena berkurangnya jumlah pasukan akibat dari pembelotan pasukan besar-besaran. Mayoritas anak-anak yang direkrut berasal dari keluarga miskin, dilakukan saat tentara-tentara memasuki desa-desa dekat markas militer mereka dan menuntut perekrutan dengan paksaan. Jika penduduk desa gagal merekrut, mereka diminta untuk membayar secara kolektif sebesar 30.000-50.000 kyatt. Faktor dijanjikan gaji sebesar 30.000 kyatt juga menjadi salah satu faktor sebuah keluarga menyerahkan anak mereka untuk direkrut.

c. Penelitian Child Soldiers International Terhadap Kelompok Oposisi Bersenjata (KNU/KNLA dan DKBA)

• Program Penelitian terhadap KNU/KNLA

Child Soldiers International menerima pernyataan dari komandan KNLA dalam misi penelitian terhadap KNU/KNLA, dan menerima pengakuan bahwa:

1) KNLA memiliki estimasi jumlah kekuatan sebanyak 4.000-6000 pejuang.

KNLA beroperasi atas dasar sistem perekrutan kuota, dimana setiap keluarga dimina lebih dari satu mengirimkan satu anak laki-laki untuk bergabung dengan barisan KNLA. Alasan beberapa anak untuk bergabung dengan KNLA adalah keinginan untuk melindungi masyarakat dan keluarga dari Tatmdaw Kyi, balas dendam dan memperjuangkan identitas dan nasionalitas etnisnya.

2) KNLA tidak memiliki kebijakan untuk merekrut anak-anak. dalam KNLA tidak ada prosedur verifikasi usia yang diandalkan pada perekrutan. Child Soldiers International tidak menemukan adanya indikasi bahwa KNLA

menempatkan tentara anak pada tahun 2012 dan ada perintah tegas untuk

tidak merekrut dibawah 18tahun yang dikeluarkan pimpinan KNLA setiap tahun.

- 3) Anak-anak dibawah 18tahun yang di kirim ke markas-markas militer KNLA merupakan sarana untuk menanamkan disiplin pada mereka. Anak-anak tersebut dikenalkan untuk membawa senjata dan peralatan, dan dalam beberapa kasus mereka menggunakan seragam KNLA meskipun ada perintah dari komandan KNLA untuk menghentikan praktek tersebut.

Child Soldiers International juga menerima pernyataan dari anak laki-laki yang menghabiskan waktunya di markas KNLA dan mengambil beberapa kegiatan rekreasi atau menjalankan tugas. Beberapa anak di markas KNLA terlibat dalam memasak, membersihkan, mengumpulkan kayu bakar, mereka diberikan pelatihan militer, namun tidak dimaksudkan untuk mencakup partisipasi aktif dalam konflik.

- Program Penelitian terhadap Democratic Karen Benevolent Army (DKBA)

DKBA memisahkan diri dari KNU/KNLA pada tahun 1994 sebagai akibat dari perbedaan agama untuk bergabung dengan rezim Myanmar, tetapi fraksi yang dipimpin oleh Jenderal Saw Ler Pwe menolak untuk menjadi BGF. DKBA telah berusaha memperbaiki hubungan dengan KNU untuk meminimalkan perbedaan agama.

Dalam misi penelitian Child Soldiers International terhadap DKBA mendapatkan pernyataan dari komandan senior DKBA bahwa pada bulan agustus 2010 tidak ada lagi anak-anak yang secara resmi diterima sebagai pejuang anak.

anak tersebut malah dikirim ke sekolah. Namun Child Soldiers International menemukan bahwa:

- 1) Tidak ada perintah tertulis untuk sikap tersebut dan setiap arahan lisan untuk dilaksanakan ditingkat perintah yang berbeda masih belum jelas.
- 2) Berdasarkan informasi yang didapat, Anak-anak digunakan dalam peran tempur oleh DKBA di tahun 2011. Beberapa komandan mendorong anak-anak muda untuk terlibat langsung dalam pertempuran tanpa diberi pelatihan sebelumnya. Anak-anak juga terindikasi bahwa mereka digunakan sebagai penjaga keamanan di pos pemeriksaan di daerah yang jauh dari kantor pusat. Sebagian dari anak-anak tersebut adalah berasal dari orang-orang miskin, sering terlantar, atau orang-orang yang mencari tempat untuk berlindung dalam kelompok bersenjata.
- 3) Personil DKBA tidak menerima gaji, namun mereka diberi makan, diberi tempat tinggal seperti dengan halnya dalam KNLA. Hal tersebut terjadi sebagai hasil imbang bagi sebagian anak muda di situasi rentan terutama terjadi di daerah-daerah negara Kayin pusat (dimana tempat dasar DKBA) karena tingkat kronis perampasan tanah, kerusakan lingkungan dan dampak konflik.
- 4) Anak-anak yang bukan pejuang namun tinggal dalam kompleks militer DKBA mereka juga menggunakan seragam DKBA. Child Soldiers International menerima pernyataan dari DKBA's General, Ko Myo bahwa hal tersebut terjadi karena anak-anak ingin merasakan bahwa mereka adalah bagian dari

C. Upaya Child Soldiers International Melalui Kerjasama Internasional

1. Kerjasama dengan PBB

Child Soldiers International dalam upayanya menanggulangi penggunaan tentara anak di Myanmar dilakukan dengan memberikan kontribusi untuk bagian yang berhubungan dengan perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, Child Soldiers International menyajikan rekomendasinya untuk sebagian besar digunakan dalam draft JAP (Join Action Plan) yang disepakati antara pemerintah Myanmar dan PBB pada tahun 2012 guna mencegah penggunaan anak-anak dalam pertempuran dan angkatan bersenjata Myanmar. Terutama rekomendasi dalam kaitannya dengan akses ke kelompok-kelompok bersenjata non negara, mekanisme pertanggungjawaban dan keadilan, dan pelaksanaan Join Action Plan.⁵⁸

Bagian penting dari tugas Child Soldiers International ialah memperkuat kerja komite PBB tentang hak anak dengan cara koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan internasional. Child Soldiers International secara konsisten dalam menanggung pengetahuan, pengalaman dan visi untuk mendukung upaya mereka terlibat dalam perjuangan untuk mengakhiri perekrutan dan penggunaan tentara anak.

Dukungan Child Soldiers International kepada Committee on the Right of the Child (CRC) menjadi salah satu komponen terpenting dan elemen kunci dalam strategi advokasi internasionalnya. Pada maret 2012, Child Soldiers International menyampaikan laporan bayangan "Myanmar Shadow Report: *Report to the*

⁵⁸ Child Soldiers International, "Director's report and Final Statements" (2012) diunduh dari [http://www.childsoldiersinternational.org.uk/node/100](#) tanggal 26 Oktober 2014.

Committee on the Right of the Child in advance of the examination of Myanmar's report on the Convention on the Right of the Child untuk memberikan saran teknis dan kebijakan secara langsung, Child Soldiers International menginformasikan daftar masalah dalam pertemuan pra sesi guna membantu persiapan CRC. Perhatian Child Soldiers International menjadi poin cerminan secara rinci dalam dokumen PBB salah satunya dalam draft Join Action Plan atau dalam dokumen CRC. Pada Agustus 2012 Child Soldiers International kembali menyerahkan draft tentang rancangan komentar umum CRC mengenai hak-hak anak dan sektor bisnis. Sebagai konsekuensi sesuai identitas, komentar umum yang diajukan juga memasukkan referensi khusus tentang tentara anak.

Selain bekerjasama dengan CRC, Child Soldiers International juga bekerjasama dengan The UN Security Council Working Group on Children and Armed Conflict (SCWG). Child Soldiers International juga melakukan dialog intensif dengan UNICEF dan badan PBB lainnya mengenai aliran laporan, pertemuan informal dan formal, dan pertemuan bilateral.

Child Soldiers International merancang khusus laporannya untuk memberikan bantuan praktis bagi siapapun yang mencari cara untuk mencegah perekrutan anak-anak yang melanggar hukum oleh negara. Dalam laporan tersebut ditetapkan langkah yang akan membangun penghalang yang efektif untuk penggunaan tentara anak di masa depan.

Child Soldiers International berusaha membantu negara-negara dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana menilai lebih akurat risiko dalam situasi sebuah negara tentang penggunaan tentara anak

mengidentifikasi hukum untuk mencari langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk mencegah penggunaan tentara-anak, mempromosikan agenda pencegahan.

Dalam perkembangan dari program penelitian Child Soldiers International di Myanmar yang diterima majelis umum PBB pada Desember 2012 dan Maret 2013, Majelis umum PBB dan Dewan HAM PBB kembali mengeluarkan resolusi mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar yang menimbulkan keprihatinan dan menerima rekomendasi Child Soldiers International pada isu tentara anak di Myanmar. Resolusi dewan HAM meminta pemerintah Myanmar untuk mengijinkan akses tanpa hambatan bagi tim negara PBB ke situs militer tentara nasional dan ke situs BGF untuk mengidentifikasi anak-anak yang berada dalam jajaran tentara anak, dan membebaskan mereka. Resolusi tersebut juga mendesak pemerintah untuk memfasilitasi dialog antara PBB dan kelompok-kelompok bersenjata non negara untuk melepaskan tentara anak yang terlibat dalam kelompok tersebut.⁵⁹

2. Sosialisasi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Child Soldiers International dan rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada pihak terkait, dituangkan dalam sebuah laporan sebagai bentuk sumber daya publikasi dan kampanye yang telah diterbitkan pada Januari 2013 dalam sebuah judul "*Chance for Change: Ending the Recruitment and Use of Child Soldiers in Myanmar*". Child Soldiers International mempublikasikan laporan secara internasional dan telah diliput oleh setidaknya 30 media diseluruh dunia dan dilakukan dengan perhatian khusus

⁵⁹Child Soldiers International, "Director's report and Final Statements" (2013) diunduh dari

dengan memberikan bukti nyata tentang perekrutan anak yang sedang berlangsung ke dalam tentara nasional Myanmar yang tidak sesuai dengan isi komitmen Join Action Plan.

Child Soldiers International dengan menyebarkan hasil penelitian telah menjadi salah satu bentuk upaya sosialisasinya dalam menanggulangi penggunaan anak dalam pertempuran. Tindakan Child Soldiers International lebih lanjut pada Maret 2013 dengan menyajikan laporan tersebut kepada anggota pembuat kebijakan dan anggota organisasi masyarakat di London Royal Institute of International Affairs atau dikenal sebagai Chatham House. Kemudian setelah itu Child Soldiers International melakukan pertemuan lebih intensif ke SCWG (The UN Security Council Working Group on Children and Armed Conflict) di New York pada bulan Mei 2013.⁶⁰ Dalam pertemuan tersebut, Child Soldiers International menyampaikan rekomendasi untuk beberapa pihak berdasarkan penelitian yang dilakukan. Rekomendasi tersebut diberikan kepada pemerintah Myanmar, kepada kelompok bersenjata non negara (NSAGs), kepada PBB, dan komunitas internasional. Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan yaitu;⁶¹

a. Rekomendasi Child Soldiers International untuk Pemerintah Myanmar:

- 1) Meminta pemerintah Myanmar terus melaksanakan sepenuhnya Join Action Plan yang telah ditandatangani. mengidentifikasi, mendaftarkan dan melepaskan semua anak yang hadir dalam jajaran Tatmadaw Kyi dan BGFs, serta

⁶⁰Ibid, hal. 9

⁶¹Child Soldiers International, "Briefing on the situation of underage recruitment and use by armed forces and groups in Myanmar May 2013"

mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah perekrutan anak-anak ke dalam Tatmadaw Kyi dan BGFs.

- 2) Menyediakan akses tanpa hambatan ke situs militer dan daerah lain di mana anak-anak dapat ditemukan untuk memungkinkan suatu tugas PBB untuk membantu dalam mengidentifikasi, mendaftar dan penggunaan semua anak yang hadir dalam jajaran Tatmadaw Kyi dan BGFs.
- 3) Memperkuat upaya dalam rangka mencegah perekrutan di bawah umur di masa depan melalui penguatan prosedur perekrutan dan pengawasan di semua situs perekrutan Myanmar. Membangun database pusat dengan informasi pribadi dari Tatmadaw Kyi dan BGF merekrut; dan mereformasi sistem pencatatan sipil untuk memastikan bahwa semua anak terdaftar di kelahiran secara gratis dan tanpa diskriminasi.
- 4) Segera mengakhiri praktek pelecehan, penahanan dan hukuman penjara terhadap anak-anak dengan alasan desersi dari angkatan bersenjata, dan memastikan pembebasan anak-anak berlangsung cepat dan tanpa syarat.
- 5) Efektif dan independen dalam menyelidiki semua tuduhan perekrutan anak atau penggunaan oleh Tatmadaw Kyi dan BGFs, dan membawa pelaku ke pengadilan dalam proses pemenuhan standar internasional untuk keadilan.
- 6) Menangguhkan personel militer yang diduga melanggar dari tugas wajib selama menunggu penyelesaian investigasi, dan mengambil tindakan disipliner yang sesuai terhadap mereka.
- 7) Menyediakan dan memfasilitasi akses gugus tugas negara PBB dan organisasi kemanusiaan independen lain ke kelompok-kelompok bersenjata non-negara

untuk memungkinkan negosiasi rencana aksi dan langkah-langkah lain, dan untuk memantau dan memverifikasi laporan perekrutan dan penggunaan anak, dan untuk memastikan pembebasan dan reintegrasi anak yang terkait dengan kelompok-kelompok bersenjata.

- 8) Ketentuan Dukungan ditujukan untuk pembebasan, pemulihan dan reintegrasi anak yang terkait dengan kelompok-kelompok bersenjata melalui damai atau negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan dengan kelompok-kelompok bersenjata, sesuai dengan petunjuk PBB untuk mengatasi masalah anak-anak dalam perjanjian damai, dan menuntut pembebasan diverifikasi anak oleh kelompok-kelompok bersenjata sebagai prasyarat untuk dimasukkan ke dalam pasukan keamanan negara.
- 9) Secepat mungkin meratifikasi Optional Protocol Convention on the Right of the Child tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.

b. Rekomendasi Child Soldiers International kepada kelompok bersenjata non negara berdasarkan penelitian terhadap KNLA dan DKBA:

- 1) Menerbitkan dan menyebarkan perintah kepada seluruh anggota kelompok bersenjata untuk menahan diri dari merekrut atau menggunakan anak-anak dalam permusuhan.
- 2) Pastikan bahwa anak-anak tidak mengambil bagian dalam operasi militer dan tidak hadir di markas militer atau di sekitar sasaran militer.
- 3) Memfasilitasi akses ke PBB dan organisasi kemanusiaan independen lainnya untuk tujuan memantau, melacak dan reintegrasi anak yang terkait dengan

c. Rekomendasi Child Soldiers International untuk PBB:

- 1) Pastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan oleh gugus tugas PBB untuk mendukung pemerintah Myanmar dalam mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melaksanakan Join Action Plan dan untuk memantau pelanggaran terhadap anak-anak secara komprehensif;
- 2) Melaporkan hasil dalam waktu 12 bulan dari pelaksanaan Join Action Plan dan langkah-langkah lain yang diambil untuk melindungi anak-anak dari perekrutan di bawah umur dan digunakan dalam hostilities.

d. Rekomendasi Child Soldiers International terhadap masyarakat internasional:

- 1) Pastikan bahwa bantuan internasional untuk mendukung reformasi sektor keamanan di Myanmar memberikan kontribusi untuk perubahan yang nyata melalui pencegahan prajurit perekrutan dan penggunaan anak, termasuk dengan memperkuat prosedur perekrutan dan mekanisme verifikasi usia dan pemantauan independen dan pengawasan di angkatan bersenjata dan BGFs.

D. Hambatan Child Soldiers International di Myanmar

Dalam upaya mengatasi tentara anak di Myanmar, Child Soldiers International lebih menargetkan strategi advokasinya melalui PBB dan badan-badan dalam PBB lainnya karena memiliki beberapa hambatan dalam melakukan advokasi langsung ke Myanmar. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi Child Soldiers International yaitu :

1. Ketidakstabilan Dana

Child Soldiers International merupakan organisasi yang telah berdiri independen pada tahun 2011 semenjak berdiri pada tahun 1998 sebagai koalisi yang didirikan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan internasional. Transisi dari koalisi menjadi organisasi yang berdiri bebas dan independen memberikan dampak yang cukup panjang. Child Soldiers International mengalami penurunan pendapatan dana sekitar 44% dikarenakan beberapa organisasi pendonor yang sebelumnya mendukung koalisi tidak mempertahankan dukungan finansialnya.⁶²

Dalam laporan keuangan Child Soldiers International telah dicantumkan terjadinya penurunan jumlah dana (dalam poundsterling) yang didonorkan kepada child soldiers International yang dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:⁶³

Tabel 4.1 Laporan Keuangan Child Soldiers International

Tahun	2011	2012	2013
Incoming resource			
Voluntary Income	626. 609£	573. 752£	318. 648£
Activities for generating funds	140£	35£	128£
Bank interest receivable	1. 284£	2. 357£	1. 417£
Total income resource	628. 033£	576. 144£	320. 193£

Sumber: Child Soldiers International Director's Report and Financial statement: 31 Maret 2011, 31 Maret 2012, 31 Maret 2013 diakses dari <http://apps.charitycommission.gov.uk>

⁶²Child Soldiers International, "Director's report and Final Statement" diunduh dari <http://apps.charitycommission.gov.uk> pada tanggal 20 October 2014

Voluntary income merupakan dana -(dalam Poundsterling) -yang sukarela diberikan oleh beberapa organisasi yan dipaparkan beserta jumlahnya dengan menggunakan tabel sebagai berikut:⁶⁴

Tabel 4.2 Daftar Pendoron Child Soldiers International

Tahun	2011	2012	2013
Voluntary income			
Anonymous Foundation	147.187£	234.222£	160.269£
Evan Cornish Foundation	-	-	3.000£
Finland Ministry for Foreign Affairs	-	172.526£	-
Foundation Open Society Intitute	-	-	43.410£
French Embassy in the Democratic of Congo	41.614£	21.173£	-
Caipirinha (Lee & Gund) Foundation	6.325£	-	-
Sweden Ministry for Foreign Policy	182.796£	-	-
Oak Foundation	154.000£	-	-
Liechtenstein Office for Foreign Affairs	-	6.747£	6.479£
Luxembourg Ministry for Foreign Affairs	-	38.665£	19.286£
Norway Royal Ministry for Foreign Affairs	64.683£	66.401£	65.381£
Switzerland Federal Departement of Foreign Affairs	23.553£	29.974£	13.599£

Others Donations	6.451£	4.044£	7.224£
------------------	--------	--------	--------

Sumber: Child Soldiers International Director's Report and Financial statement: 31 Maret 2011, 31 Maret 2012, 31 Maret 2013 diakses dari <http://apps.charitycommission.gov.uk>

Ketidakstabilan dana telah menjadi penghambat dalam Child Soldiers untuk lebih leluasa dalam bekerja sebagai organisasi independen. Terlebih organisasi kemanusiaan internasional di Myanmar harus terus berjuang dengan biaya transaksi yang sangat tinggi. Beberapa organisasi bantuan harus menunggu 3 bulan untuk memperoleh visa masuk ke Myanmar dan membayar 300% pajak untuk membayar kendaraan. Selain itu, staff organisasi internasional harus memperoleh persetujuan SPDC dan ditemani pejabat SPDC yang membuat hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan penilaian rahasia independen. LSM internasional juga harus bernegosiasi nota kesepahaman (MoU) dengan SPDC, dengan memberikan deskripsi rinci dari proyek-proyek yang direncanakan.⁶⁵ Organisasi internasional juga dihadapkan dengan kebijakan SPDC yang sangat tak terduga, yang terus berubah dan peraturan yang mempengaruhi operasi lembaga internasional.

2. Keterbatasan Akses

Organisasi kemanusiaan di Myanmar harus terus berjuang dengan birokrasi dan prosedur administrasi yang kadang-kadang mengganggu yang dikenakan oleh SPDC. Kebijakan SPDC memperketat pembatasan pada operasi lembaga kemanusiaan dan pengembangan dari badan-badan PBB, LSM internasional dan

⁶⁵ W. A. Hinton, *Children and Armed Conflict: "No More Denial"* 2000, hal. 13.

kelompok-kelompok lokal. Pada bulan Februari 2006, SPDC mengeluarkan seperangkat pedoman birokrasi untuk badan-badan PBB, organisasi internasional dan LSM Internasional yang dimaksudkan untuk membatasi ruang dan kegiatan operasional mereka. Pedoman tersebut diberikan pada semua bidang kerja, wisata, visa, impor dan lokakarya yang harus disetujui terlebih dahulu oleh beberapa kementerian dan komite bantuan lokal.⁶⁶

Pemerintah Myanmar menolak untuk memberikan akses ke daerah-daerah tertentu atas dasar keamanan nasional yang menjadi pencegah untuk Child Soldiers International dalam melakukan pemantauan independen terhadap kelompok-kelompok bersenjata. Sehingga Child Soldiers International tidak dapat secara bebas dalam pemantauan untuk mencari informasi tentang tentara anak diantara kelompok bersenjata. Child Soldiers International bekerjasama dengan HREIB (Human Rights Education Institute of Burma) merupakan yayasan yang terdaftar dengan kantor administrasi di Thailand dalam mencari informasi tentang tentara anak dilakukan dengan mewawancarai mantan tentara anak.

Meskipun SPDC menolak untuk memberikan akses langsung ke daerah-daerah, Child Soldiers International terus berupaya dalam mengumpulkan informasi untuk mengatasi penggunaan tentara anak. upaya tersebut dilakukan dengan misi penelitian yang dilakukan di Thailand, di perbatasan Thailand-Myanmar dan di Myanmar pada Maret 2011, April-Mai 2012, Juli-Agustus 2012

Karena tidak dapat mengakses langsung daerah-daerah konflik dimana banyak terjadi pelanggaran HAM, upaya hanya dapat dilakukan Child Soldiers International melalui misi penelitian berbasis penelitian meja dengan mengadakan pertemuan dengan para pejabat Senior PBB di Thailand dan Myanmar, pejabat dari International Committee of the Red Cross, para diplomat, perwakilan dari organisasi non-pemerintah nasional dan internasional, mantan tentara anak, perwakilan tentara dari beberapa kelompok bersenjata non-negara (KNU/KNLA dan DKBA). CSI juga mengadakan diskusi di Yangoon dengan menteri Aung San Min dan staff dari Myanmar Peace Support Initiative, perwakilan dari empat partai politik, organisasi masyarakat sipil.⁶⁷ SPDC menolak akses organisasi internasional dengan alasan kekhawatiran keamanan negara.

3. Tidak Adanya Kewenangan

Sebagai International Non-Governmental Organization, Child Soldiers International tidak memiliki kewenangan dalam merubah kebijakan suatu negara. Untuk mendapatkan akses bebas ke daerah-daerah konflik saja dibatasi dan ditolak oleh SPDC, terlebih untuk mempengaruhi kebijakan tentang tentara anak, sangat kecil kemungkinan bagi INGO/LSM internasional untuk dapat melakukannya. Karena Child Soldiers International tidak bisa melakukan advokasi langsung ke pemerintah Myanmar dalam mempengaruhi kebijakan tentang tentara anak, Child Soldiers International melakukan advokasi internasional melalui PBB, badan-badan PBB lainnya dan masyarakat

internasional dengan cara kerjasama dan sosialisasi sebagai salah satu upayanya dalam mengatasi fenomena tentara anak di Myanmar.

Child Soldiers International berkontribusi melalui rekomendasi yang digunakan dalam draft Join Action Plan tahun 2012 antara pemerintah Myanmar dan PBB. Child Soldiers International dengan konsisten menanggung pengetahuan, pengalaman dan visi untuk mendukung upaya bagi mereka yang terlibat dalam perjuangan untuk mengakhiri penggunaan tentara anak di Myanmar. Temuan yang dihasilkan oleh Child Soldiers International melalui misi penelitiannya, dan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat dalam usaha untuk memberikan kontribusi pada perlindungan anak dari perekrutan dalam pertempuran dengan semua pihak di Myanmar. Dan diharapkan temuan dan rekomendasi oleh Child Soldiers International akan dapat membentuk dasar bagi